

ABSTRAK

REFORMULASI PENGATURAN DAN TANGGUNGJAWAB *BENEFICIAL OWNERSHIP* DALAM PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dhimas Saputra (2210622053), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran pidana yang melibatkan pemilik keuntungan (*beneficial owners*). Pemilik keuntungan adalah mereka yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan. Namun, mengidentifikasi pemilik keuntungan seringkali sulit karena adanya upaya untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya guna menghindari tanggung jawab hukum. Selain itu, penuntutan pelanggaran yang melibatkan pemilik keuntungan juga menghadapi tantangan hukum, prosedural, dan praktis, yang dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem identifikasi dan penuntutan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas belum diatur secara spesifik dalam kerangka hukum nasional. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 telah memperkenalkan definisi pemilik manfaat, namun masih ada kekosongan hukum terkait kedudukannya dalam perseroan. Sebagai pemilik tertinggi, pemilik manfaat memiliki wewenang pengendalian tanpa perlu otorisasi dari pihak lain. Jika terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, pemilik manfaat dapat dikenakan sanksi yang meliputi harta pribadinya. Selain itu, berdasarkan konsep "*piercing the corporate veil*", pemilik manfaat yang menggunakan perseroan untuk tindakan melawan hukum dapat dianggap sebagai pelaku kepemilikan korporasi yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: beneficial ownership; perseroan terbatas; tindak pidana pencucian uang.

ABSTRACT

REFORMULATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP ARRANGEMENTS AND RESPONSIBILITIES IN LIMITED LIABILITY COMPANIES RELATED TO MONEY LAUNDERING OFFENSES

Dhimas Saputra (2210622053), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

In the Indonesian context, vigorous law enforcement is needed to overcome criminal violations involving beneficial owners. Beneficial owners are those who obtain economic benefits from an entity or company. However, identifying beneficial owners is often difficult due to efforts to hide actual ownership to avoid legal liability. In addition, prosecuting offenses involving beneficial owners also faces legal, procedural, and practical challenges, which can make law enforcement less effective. Therefore, a thorough evaluation of the identification and prosecution system is essential to improve the effectiveness of law enforcement. Based on the research results, the position of the beneficial owner in a limited liability company has not explicitly been regulated in the national legal framework. Presidential Regulation Number 13 of 2018 has introduced a definition of a beneficial owner, but there is still a legal vacuum regarding their position in the company. As the ultimate owner, the beneficial owner has control authority without needing authorization from other parties. If involved in a money laundering crime, the beneficial owner may be subject to sanctions covering his personal property. In addition, based on the concept of "piercing the corporate veil", beneficial owners who use the company for unlawful actions can be considered as irresponsible corporate owners.

Keywords: *beneficial ownership; limited liability company; money laundering crime.*